

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016. Tahun 2016 adalah tahun ke lima (5) pelaksanaan RPJMD yang merupakan proses berkesinambungan sejak tahun 2011. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir kebijakan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat rukun dan damai dan melanjutkan fokus pembangunan tahun 2015 yang belum tercapai dan diprioritaskan pada layanan kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan daerah, pembangunan ekonomi unggulan, kesejahteraan sosial peningkatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan arah ekonomi nasional tahun 2016 untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terfokus pada:

1. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Membangun ke daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan
3. Pembangunan kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional.
4. Penguasaan SDA melalui 7 langkah & penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional
7. Penguatan investasi domestik
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara
9. Membangun Infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim
11. Penguatan sektor kehutanan
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan
14. Membangun karakter dan potensi wisata
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
16. Pengembangan industri Manufaktur

Adapun isu strategis Jawa Timur tahun 2015 dan tahun 2016 yang merupakan rangkaian pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya adalah:

1. Menuju pertumbuhan yang inklusif

Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah serta peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

2. Isu strategis yang mengemuka

Adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

3. Disparitas Wilayah

Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4. Infrastruktur

- a. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi darat, laut dan udara dalam konteks integrasi pelayanan antar kota untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
- b. Dibutuhkan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan
- c. Peningkatan harmonisasi kerjasama pemanfaatan barang milik daerah (Provinsi) berupa pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal Bandara Abdul

- Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah
- d. Kebutuhan akan pertambahan panjang Jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota
 - e. Peningkatan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016
 - f. Peningkatan dan pembangunan Jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan pelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak
 - g. Percepatan pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu
 - h. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran
 - i. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
 - j. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota
 - k. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air

5. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

6. Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (*captive power*) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energi juga akan meningkat dengan kontribusi pertambahan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan

ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.

7. Lingkungan Hidup

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja *(diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012)*. Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

8. IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

9. Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013
2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam

4. Belum optimalnya peran kelembagaan petani
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agrobisnis
6. Ketahanan Pangan
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi
 - b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian

10. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013. Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester tahun 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

11. Kerjasama Daerah

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

12. Komunikasi dan Informatika Penanggulangan Bencana

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadikan tantangan

besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pembangunan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari kondisi perekonomian daerah tahun 2013 yang ditunjukkan dari nilai PDRB sebesar Rp.4.826,39 milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp.3.741,61 milyar meningkat sebesar Rp.1.084,74 milyar pada tahun 2012. Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2011 s/d tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-III.1
Kontribusi PDRB Sektoral

(Rp.000.000)				
NO	SEKTOR	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pertanian	1.390.157,30	1.540.293,62	1.785.952,63
2	Pertambangan dan Penggalian	121.660,39	137.771,06	152.124,43
3	Industri Pengolahan	140.963,00	156.008,47	175.784,12
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	40.879,25	44.328,60	48.758,79
5	Bangunan/Konstruksi	332.325,45	396.031,18	479.801,28
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	486.455,16	566.625,80	666.293,43
7	Angkutan dan Komunikasi	243.059,05	270.652,42	305.447,03
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	299.759,68	345.386,55	395.208,97
9	Jasa-jasa	686.355,05	755.401,04	817.024,17

Sumber Data : Pacitan Dalam Angka 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2014 mencapai angka 6,02%, ini menunjukkan bahwa perekonomian semakin baik dan dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan hingga tahun 2014 sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dan potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Pacitan serta perkiraan kondisi di tahun 2015, maka kondisi perekonomian di tahun 2016 akan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, antara lain:

1. Kondisi peralatan kesehatan dan penunjang medis pelayanan yang masih kurang sebagai penunjang dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat dimaksimalkan. Selain itu Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih cukup tinggi yaitu 114,34 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKB) sebesar 9.64 per 1000 kelahiran hidup
2. Masih rendahnya capaian APK dan APM Pendidikan Menengah yang sebesar 70,15% bila dibandingkan dengan APK dan APM Pendidikan Dasar 103,11% dan masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi SPM
3. Masih rentannya tingkat ketahanan pangan daerah dan belum optimalnya produksi pangan belum utama daerah
4. Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun regional dan nasional

Selain tantangan tersebut, ada beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Pacitan di tahun 2016 antara lain:

1. Trend kondisi perekonomian yang terus membaik diharapkan akan terus dapat dijaga pada tahun 2016, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat terkait dengan harga dan ketersediaan bahan pokok utama
2. Kondisi struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menunjukkan trend yang terus membaik dengan meningkatnya penerimaan pendapatan dan meningkatnya alokasi Belanja Langsung diharapkan akan ikut menopang kondisi perekonomian di tahun 2016
3. Akan selesainya proyek strategis nasional seperti JLS dan infrastuktur lainnya terutama yang terkait dengan perhubungan, yang diharapkan akan memperlancar arus distribusi barang dan jasa sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016, sehingga semua target indikator kinerja yang ada diharapkan akan tercapai di akhir tahun 2016. Dari sisi perekonomian daerah, pencapaian indikator makro ekonomi Kabupaten Pacitan akan sangat terpengaruh kepada kebijakan di tingkat pusat maupun situasi perekonomian global, nasional dan regional. Proyeksi beberapa indikator makro ekonomi di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.2
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016

NO	SEKTOR	Tahun 2014**	Tahun 2015**	Tahun 2016**
1	PDRB ADHK (Milyar)	1.989,95	2.147,33	2.295,50
2	PDRB ADHB (Milyar)	5.442,09	5.113,23	5.585,99
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,49	6,85	6,9
4	Laju Inflasi (%)	9,7	4,95	4,94
5	PDRB Perkapita (Ribu)	9.089,50	8.564,48	9.169,65
6	Penduduk Miskin (%)	16,86	15,81	15,75
7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,27	73,36	73,41

**) Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah), data sangat sementara

Kemampuan fiskal daerah yang terbesar masih bertumpu pada dana dari pusat terutama Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya, walaupun dari sisi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan. Pada sisi Pembiayaan Daerah, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, bagi hasil kepada pemerintah desa, penyertaan modal dan pembiayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua (2) elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pacitan. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penyerapan lapangan kerja.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan sumber pendapatan daerah dalam APBD: laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *entitas* akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai *entitas* pelaporan menjadi laporan keuangan Kabupaten Pacitan. Sedangkan laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh DPPKA. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara umum didasarkan pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis *akrual* yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan *ekuitas* dalam pelaporan finansial berbasis *akrual*, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal pelaporan dan pengawasan, Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK pada tahun 2010 dan tahun 2011 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara pada periode tahun 2013, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mengalami penurunan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun 2014 kembali meraih predikat WTP kembali.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan keuangan daerah dan asumsi makro ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2016, serta untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan pendapatan daerah antara lain :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengkajian ulang Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah, dan penyusunan kembali Peraturan Daerah dalam kerangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemantapan kelembagaan SKPD penghasil
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
5. Meningkatkan peran dan fungsi peran SKPD penghasil dan
6. Pengelolaan aset daerah

Penerimaan pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 s/d tahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik meskipun komponen pendapatan yang terbesar masih diperoleh dari Dana Perimbangan baik DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sesuai dengan analisis dengan acuan tahun-tahun sebelumnya, dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Pacitan pada tahun 2016. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perkembangan realisasi pendapatan serta proyeksi pendapatan pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Tahun 2013 s/d 2016

(Rp. 000)					
NO	URAIAN	JUMLAH			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	62.988.926	82.668.794	89.469.531	105.658.267
1.1.1	Pajak daerah	9.053.156	17.018.500	18.147.500	22.309.000
1.1.2	Retribusi daerah	18.399.845	13.166.141	12.655.181	20.003.131
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.259.920	2.236.525	2.350.510	3.685.561
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	33.276.003	50.247.627	56.316.338	59.660.574
1.2	Dana Perimbangan	756.837.409	811.839.783	833.044.603	848.336.171
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	57.606.486	59.226.899	56.353.300	54.902.454
1.2.2	Dana alokasi umum	647.293.403	700.743.024	714.847.233	732.718.413
1.2.3	Dana alokasi khusus	51.937.520	51.869.860	61.844.070	60.715.303
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	241.571.653	319.196.004	308.652.610	334.212.321
1.3.1	Hibah	1.925.000	0	0	0
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	34.123.870	53.166.048	48.635.187	54.625.114
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	172.525.413	181.430.769	260.017.423	279.587.207
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya)	34.920.445	84.599.187	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.061.397.988	1.213.704.582	1.231.166.745	1.288.206.761

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pendapatan daerah masih menggantungkan pada sumber pendapatan yang berasal dari pusat baik Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

Penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2013 dan tahun 2014 telah melebihi proyeksi penerimaan pendapatan RPJMD tahun bersangkutan. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah capaian tahun 2014 telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan bahkan melebihi proyeksi pada akhir RPJMD. Disisi penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahu 2013 hal tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal.

3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja Kabupaten Pacitan tahun 5 (kelima) dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2016 di fokuskan pada pembangunan untuk mewujudkan masyarakat rukun

dan damai, dan penguatan tatanan sosial masyarakat dan 6 (enam) prioritas tahun 2016, juga melanjutkan fokus pembangunan tahun-tahun sebelumnya target kinerjanya yang belum tercapai sampai tahun 2015. Kebijakan ini dituangkan dalam tema pembangunan tahun 2016 yaitu **“Melanjutkan Penyediaan Layanan Publik yang berkesinambungan dan Memperkuat Daya Saing Perekonomian Menuju Pacitan Sejahtera”**.

Sedangkan 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2016 adalah :

- 1. Layanan Kesehatan dan Pendidikan;
- 2. Ketahanan Pangan Daerah;
- 3. Pembangunan Ekonomi Unggulan;
- 4. Kesejahteraan Sosial;
- 5. Peningkatan Infrastruktur dan;
- 6. Tata Kelola Pemerintahan.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pacitan diproyeksi dengan melihat pada tahun 2013 sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2015. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2013 s/d tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel.T-III.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2013 s/d 2016

(Rp. 000,00)					
NO	URAIAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	724.455.198	867.500.566	935.786.180	963.422.564
2.1.1	Belanja pegawai	607.673.757	725.550.962	766.008.287	769.204.057
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	24.769.472	26.335.801	24.432.345	8.729.525
2.1.5	Belanja bantuan sosial	4.544.127	8.462.084	5.474.547	6.406.648
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	3.300.666	3.673.273	3.574.422	3.970.494
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	82.534.550	101.578.444	134.384.891	173.866.022
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.632.623	1.900.000	1.911.686	1.245.819
2.2	Belanja Langsung	312.524.900	416.820.198	333.836.826	362.005.264
2.2.1	Belanja pegawai	36.427.365	36.588.711	39.263.298	46.668.213
2.2.2	Belanja barang dan jasa	143.242.808	174.943.303	162.411.609	169.069.321
2.2.3	Belanja modal	132.854.725	205.288.184	132.161.917	146.267.730
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.036.980.098	1.284.320.764	1.269.623.006	1.325.427.827

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan Belanja Tidak Langsung paling besar dipengaruhi oleh belanja Gaji Pegawai. Pada tahun 2013 jumlah anggaran belanja Gaji Pegawai mencapai

Rp.607.673.757,000, pada tahun 2014 terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 725.550.962,000 atau naik 19,40% dibanding tahun 2013, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.766.008.287.000 atau meningkat sebesar 5,56% dibanding tahun 2014.

Dari sisi belanja daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2013 s/d tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,03%. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,68%, sedangkan untuk Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 4,87% dari jumlah Belanja Daerah berdasarkan proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Langsung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Belanja Tidak langsung lebih besar dari Belanja Langsung dengan perbandingan 69.86 : 30.14 pada tahun 2013 dan 67.55 : 32.45 pada tahun 2014 sedangkan tahun 2015 perbandingannya 73.71 : 26.29. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung masih memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung namun demikian pemerintah daerah terus berupaya untuk memperkecil porsi Belanja Tidak Langsung.

Dari data diatas, juga dapat dilakukan analisis sebagai proyeksi bahwa perkiraan belanja gaji untuk PNS Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.769.204.056.626,00 atau meningkat dibanding tahun 2015. Kenaikan belanja pegawai diasumsikan dari kenaikan gaji, tunjangan profesi guru dan gaji PNS yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Pacitan, setelah dikurangi belanja gaji untuk tahun 2013 s/d tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. T-III.5
Realisasi dan Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Pacitan
Tahun 2013 s/d 2016

(Rp. 000,00)				
URAIAN	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	1.051.900.555	1.213.704.575	1.231.166.742	1.288.206.761
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	48.689.392	40.554.195	22.958.659	40.171.066
Total Penerimaan	1.100.589.947	1.254.258.770	1.254.125.401	1.328.377.827
Dikurangi:				
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	698.019.076	756.080.689	820.600.028	856.949.668
Kapasitas riil kemampuan keuangan	402.570.871	498.178.081	433.525.373	471.428.160

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan (diolah)

Dari dana kapasitas kemampuan keuangan daerah yang tersedia akan digunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-III.6
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

(Rp. 000,00)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.110.166.281	1.285.820.764	1.272.573.006	1.328.377.827
A.1	PENDAPATAN	1.061.397.988	1.213.704.582	1.231.166.745	1.288.206.761
A.2	Penerimaan Pembiayaan	48.768.292	72.116.182	41.406.261	40.171.066
B	BELANJA DAERAH	1.108.714.281	1.284.320.764	1.269.623.006	1.325.427.827
B.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	724.455.198	867.500.566	935.786.180	963.422.564
B.1.1	PRIORITAS I	610.974.424	729.224.236	769.582.710	773.174.550
B.1.1.1	Belanja Gaji Dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	607.673.757	725.550.962	766.008.287	769.204.057
B.1.1.2	Belanja Bagi Hasil kpd Pemb. Prov /Kab/Kota dan Desa	3.300.666	3.673.273	3.574.422	3.970.494
B.1.2	PRIORITAS III	113.480.774	138.276.330	166.203.470	190.248.013
B.1.2.1	Belanja Hibah	24.769.472	26.335.801	24.432.345	8.729.525
B.1.2.2	Belanja Bantuan Sosial	4.544.127	8.462.084	5.474.547	6.406.648
B.1.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov. Kab/Kota dan Pemerintah desa	82.534.550	101.578.444	134.384.891	173.866.022
B.1.2.4	Belanja Tidak Terduga	1.632.623	1.900.000	1.911.686	1.245.819
B.2	BELANJA LANGSUNG	312.524.900	416.820.198	333.836.826	362.005.264
B.2.1	PRIORITAS I	41.320.847	45.516.069	46.198.810	84.795.611
B.2.1.1	Belanja Administrasi Perkantoran	41.320.847	45.516.069	46.198.810	84.795.611
B.2.2	PRIORITAS II	312.483.579	416.774.682	333.790.627	277.209.653
B.2.2.1	PROGRAM PRIORITAS PENCAPAIAN VISI DAN MISI	312.483.579	416.774.682	333.790.627	277.209.653
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.768.292	72.116.182	41.406.261	40.171.066
C.1	SILPA	48.439.392	71.734.182	41.406.261	40.171.066
C.2	Penerimaan Piutang Daerah	328.900.000	382.000.000	0	0
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.452.000	1.500.000	2.950.000	2.950.000
D.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.452.000	1.500.000	2.950.000	2.950.000
D.2	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
JUMLAH		47.316.292	70.616.182	38.456.261	37.221.066

Dari tabel kapasitas riil diatas penggunaan untuk pembiayaan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) prioritas yaitu:

1. **Prioritas I** digunakan untuk belanja wajib yang harus dibiayai untuk pelayanan dasar kepada masyarakat sebelum pembiayaan yang lain
2. **Prioritas II** digunakan untuk alokasi pembangunan daerah yang terkait urusan pelayanan pemerintahan dan belanja pembangunan yang langsung mendukung prioritas RPJMD tahun 2016

3. **Prioritas III** digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan lain sebagainya

Sedang Belanja Langsung digunakan untuk membiayai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dengan 6 (enam) prioritas utama yang tahun 2016 sebesar Rp.362.005.263.549,00 dengan rincian belanja administrasi perkantoran sebesar Rp.84.795.610.975,00 dan untuk pencapaian visi dan misi sebesar Rp.277.209.652.574,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan SILPA tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan. Selain melalui SILPA, kebijakan penerimaan pembiayaan juga ditempuh dengan peningkatan Penerimaan Piutang Daerah.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah tahun 2013 s/d tahun 2016 Kabupaten Pacitan dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. T-III.7
 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah
 Tahun 2013 s/d 2016

(Rp. 000,00)

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	48.439.392	71.734.182	41.406.261	40.171.066
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	328.900	382.000	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		48.768.292	72.116.182	41.406.261	40.171.066
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.452.000	1.500.000	2.950.000	2.950.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.452.000	1.500.000	2.950.000	2.950.000
PEMBIAYAAN NETO		47.316.292	70.616.182	38.456.261	37.221.066

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.